



BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR : 010 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN WEWENANG KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI DELI SERDANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 3 huruf b, Pasal 7 ayat 1 huruf a,b,d,e dan f ayat 2 huruf a,b,c,d,f,g,h,i,j, ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dirasa perlu memberi wewenang kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018.

b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Deli Serdang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 515 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan wewenang kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD untuk melakukan tugas – tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - d. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- KEDUA** : Dalam wewenang fungsinya selaku BUD sebagaimana dalam Diktum Kesatu huruf c, PPKD berwenang :
- a. Menyusun Kebijakan dan Pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah ;
 - e. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - g. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - h. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
 - i. Menunjuk pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Kuasa BUD;

- KETIGA : PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan / kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 11 - 01 - 2018
BUPATI DELI SERDANG



Delia
DELI ASHARI TAMBUNAN